

# PEMETAAN ANAK PUTUS SEKOLAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018-2023

## MAPPING OF SCHOOL DROPOUTS IN BANGKA CENTRE DISTRICT 2018-2023

Oleh: Fauzan Nurkholish, Universitas Negeri Yogyakarta  
[fauzannur.2020@student.uny.ac.id](mailto:fauzannur.2020@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menghasilkan peta persebaran anak putus sekolah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018-2023; 2) Menguraikan faktor penentu anak putus sekolah, dan 3) Mendeskripsikan upaya pemerintah daerah dalam penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed method) model sequential explanatory. Data diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Arcgis 10.8. Sedangkan data kualitatif menggunakan model interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam kurun waktu 6 tahun yakni 2018-2023 tercatat sebanyak 1.928 anak putus sekolah dari jenjang SD hingga SMA tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah; 2) Faktor penentu anak putus sekolah terbagi atas faktor internal, yakni anak tidak berminat lagi untuk sekolah dan eksternal, yaitu faktor sosial budaya berupa pandangan dan pola pikir lingkungan masyarakat; 3) Dinas Pendidikan berupaya sebagai fasilitator dalam mencegah dan mengembalikan anak putus sekolah dengan berbagai program daerah.

Kata Kunci: Pemetaan, Anak Putus Sekolah, Kabupaten Bangka Tengah

### Abstract

*The School This research aims to: 1) Produce a map of the distribution of children dropping out of school in Central Bangka Regency in 2018-2023; 2) Describe the factors that cause children to drop out of school, and 3) Describe the efforts of the regional government in handling children who have dropped out of school in Central Bangka Regency. This research is a combination research (mixed method) explanatory sequential model and descriptive research design. Data obtained from the Central Bangka Regency Education Office. Data collection methods through document study and interviews. Quantitative data were analyzed using Arcgis and Minitab 16.1. Meanwhile, qualitative data uses an interactive model, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that: 1) In a period of 6 years, namely 2018-2023, there were 1,928 children who dropped out of school from elementary to high school levels spread across 6 sub-districts in Central Bangka Regency; 2) The factors causing children to drop out of school are divided into internal factors, namely children no longer interested in going to school and external factors, namely socio-cultural factors in the form of views and mindsets of the community environment; 3) The Education Service seeks to act as a facilitator in preventing and returning children from school dropouts with various regional programs.*

Keywords: Mapping, School Dropouts, Bangka Centre District

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan suatu negara. Pengembangan sumber daya manusia

menjadi ihwal terpenting dan investasi di masa depan bagi pembangunan nasional. Terlebih, struktur penduduk Indonesia dewasa ini ditandai dengan tingginya

proporsi penduduk usia produktif. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa diantara upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ialah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Artinya, peningkatan mutu layanan pendidikan adalah syarat yang wajib dipenuhi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Manifestasi dari komitmen pemerintah dalam pemerataan layanan pendidikan salah satunya ialah adanya program wajib belajar sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) “wajib belajar adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Artinya, adalah kewajiban pemerintah dalam memastikan warga negara untuk mengenyam pendidikan. Saat ini, program wajib belajar mengharuskan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan atau bersekolah selama 12 tahun. Dengan kata

lain, minimal memiliki ijazah dengan kualifikasi SMA/Sederajat. Program wajib belajar saat ini merupakan kesinambungan program sebelumnya, yakni wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun.

Namun, belum semua daerah mampu mencapai dan merealisasikan rata-rata belajar 12 tahun. Secara keseluruhan, rata-rata lama sekolah (RLS) nasional hanya mencapai 8 tahun (BPS, 2022). Hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bahkan belum sepenuhnya sukses menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat. Ketidakefektifan pelaksanaan program wajib belajar juga tercermin dari angka anak putus sekolah yang masih tergolong tinggi. Saputri, dkk (2022) bahkan mengungkapkan bahwa naiknya anggaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap turunnya angka putus sekolah. Data statistik Kemendikbudristek pada tahun ajaran 2017/2018 sampai 2021/2022 mencatat terdapat sebanyak 593,924 anak mengalami putus sekolah pada skala nasional, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Angka Putus Sekolah Nasional

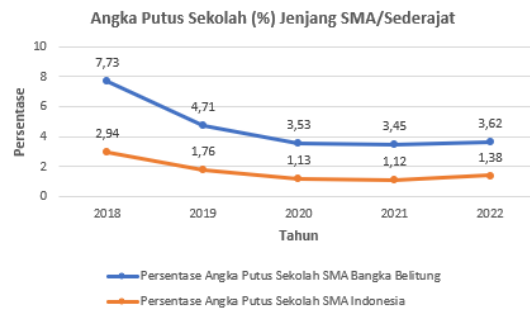
Tahun	SD	SMP	SMA	Total
2017/2018	32,127	51,190	31,123	114.440
2018/2019	57,426	85,545	52,142	195.113
2019/2020	59,443	38,464	26,864	124.771
2020/2021	44,516	11,378	27,830	83.724
2021/2022	38,716	15,042	22,118	75.876
Total	232,228	201,619	160,077	593.924

Secara formil, pemerintah sudah mencoba mengatasi masalah putus sekolah dengan kebijakan pemerataan pendidikan.

Mbae, dkk (2018) menyatakan pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan tindakan pemerataan penyelenggaraan pendidikan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mendapatkan kesempatan untuk merasakannya. Pasca penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerataan pendidikan merupakan bagian dari program desentralisasi. Artinya, kebijakan pemerataan pendidikan di daerah dapat disesuaikan sebagaimana kebutuhan, situasi, dan kondisi di daerah. Dalam konteks ini, Tilaar & Nugroho (2016: 140) menjelaskan kebijakan pendidikan pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kebijakan public pada umumnya. Secara khusus, kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidika untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun tertentu. Artinya, pasca desentralisasi daerah mempunyai kewenangan mengatur dan merumuskan khusus regulasi mengenai pendidikan di daerah kendati tetap berpedoman pada tujuan dan arah pendidikan nasional.

Lebih lanjut, salah satu daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi di Indonesia ialah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, selama tiga tahun terakhir

(2020-2022) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada urutan pertama sebagai provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi. Angka tersebut jauh melebihi rata-rata nasional. Berikut grafik angka putus sekolah jenjang SMA/Sederajat.



Gambar 1. Persentase Anak Putus Sekolah SMA/ sederajat

Kemudian, diantara daerah yang memiliki angka putus sekolah tinggi di Provinsi Kep. Bangka Belitung ialah Kabupaten Bangka Tengah. Padahal, Kabupaten Bangka Tengah sudah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kendati terdapat peraturan yang menjamin, penerapan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Bangka Tengah masih belum tercapai sesuai harapan. Terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya berkisar pada 7 tahun (BPS, 2021). Artinya, pelaksanaan program wajib belajar khususnya di

Kabupaten Bangka Tengah juga belum berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah 2021-2026, beberapa tantangan dan hambatan pemerataan di sektor pendidikan, antara lain:

1. Partisipasi dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan masih rendah

Data BPS Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016-2020 menunjukkan masih tingginya masyarakat dengan tingkat pendidikan tamat SD ke bawah yaitu sebanyak 138.017 jiwa dari jumlah penduduk berjumlah 194.432 jiwa. Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Nurjamilah & Ukhrotunnasihah (2018) mengungkapkan antara lain (1) faktor sosial budaya, yakni berkaitan dengan kultur masyarakat berupa pandangan dan kebiasaan, (2) faktor ekonomi, terkait sulitnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga harus bekerja, dan (3) faktor geografis, yaitu aksesibilitas masyarakat terhadap sekolah yang sulit dijangkau. Padahal, rendahnya kesadaran masyarakat, utamanya orang tua juga turut mempengaruhi rendahnya kesadaran akan pemerolehan pendidikan anak. Bidari & Budiantara (2020) bahkan menyatakan bahwa orangtua yang mempunyai tingkat

pendidikan yang rendah berpotensi untuk mempengaruhi anak untuk putus sekolah.

2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin

Per tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah sejumlah 9,63 ribu jiwa. Tingginya angka kemiskinan menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan bagi anak usia sekolah untuk tidak melanjutkan atau bahkan tidak mengenyam pendidikan. Abdullah Dueramae (2017) menyebutkan alasan kemiskinan berdampak terhadap tingkat pendidikan yang paling dominan adalah karena rendahnya tingkat pendapatan, ketidakmampuan untuk meraih peluang ekonomi, SDM yang tidak memadai atau kurang berkualitas, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat miskin. Lebih lanjut, Nursita & Edy (2022) menjelaskan anak dari keluarga y miskin dihadapkan pada dua pilihan dalam alokasi waktu, yakni waktu untuk sekolah dan bekerja.. Terlebih, orangtua yang tidak menganggap pendidikan sebagai investasi bagi anak-anak mereka, menjadikan opsi sekolah menjadi pilihan kedua dibandingkan bekerja. Pada akhirnya anak akan terbelenggu oleh lingkaran kemiskinan karena minimnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.

3. Kondisi sarana prasarana pendidikan yang belum optimal

Minimnya sarana prasarana pendidikan tampak pada kebutuhan kehadiran sekolah pada setiap wilayah. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangka Tengah (2021) dapat dikalkulasikan bahwa rasio luas wilayah dan jumlah SMP yang masih belum ideal. Secara rata-rata setiap 78,24 km<sup>2</sup> hanya terdapat 1 sekolah tingkat SMP. Hasil ini menggambarkan bahwa cukup jauhnya jarak antar sekolah yang harus ditempuh oleh murid-murid jenjang SMP di Kabupaten Bangka Tengah. Padahal, jarak sekolah dan tempat tinggal yang jauh ini dapat menjadi salah satu alasan bagi masyarakat enggan bersekolah. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota juga menyebutkan harus tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yakni maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km bagi tingkat SMP/MTS dari kelompok pemukiman permanen di daerah.

#### 4. Tingginya angka putus sekolah.

Berkaitan dengan fenomena putus sekolah, Nurwati (republika.co.id., 2022) mengemukakan bahwa yang menjadi sebab anak-anak memutuskan untuk putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah ialah karena anak-anak lebih tertarik untuk bekerja di bidang pertambangan timah inkonvensional. Ketertarikan ini dipicu oleh adanya kenaikan harga timah.

Mengingat fenomena tersebut, peneliti terdorong melakukan pemetaan terhadap anak putus sekolah tersebut dengan mengambil Kabupaten Bangka Tengah sebagai lokasi penelitian.

Studi pendahuluan yang dilakukan tanggal 10 Desember 2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah ditemukan pada tahun 2022 terdapat 374 anak yang mengalami putus sekolah pada jenjang SD, SMP dan SMA. Angka ini menunjukkan tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah. Secara umum, faktor yang dapat menyebabkan anak putus sekolah ialah musabab faktor internal dan eksternal (Suyadi, dalam Lestari, dkk, 2020). Selain itu, diketahui bahwasanya 374 anak putus sekolah tersebut tersebar dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun ke-6 kecamatan itu yakni Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru, Namang, Sungai Selan, dan Simpang Katis.

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat melihat objek sosial di permukaan bumi (Setiawan, dalam Septianto, 2021: 20) berupa persebaran anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, faktor penentu anak putus sekolah dan upaya pemerintah daerah dalam penanganan masalah tersebut. Dengan demikian, pemetaan yang dilakukan dapat menginformasikan gambaran anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah

tahun 2018-2023 serta didapatkan informasi-informasi penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektifitas program yang sudah dilaksanakan di daerah serta juga muncul rekomendasi-rekomendasi spesifik sesuai konteks daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kombinasi (mixed method) dengan model sequential explanatory dan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud melakukan pemetaan dan mendeskripsikan data atau gejala yang terjadi pada subjek penelitian.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Dipilihnya Kabupaten Bangka Tengah karena tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diperlukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2024.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Divisi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan, anak putus sekolah beserta orang tua dari anak-anak yang putus sekolah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan wawancara.

### **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibutuhkan untuk menjadi acuan atau panduan yang mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, data kuantitatif dianalisis menggunakan ArcGis 10.8. untuk membuat peta persebaran anak putus sekolah. Judgement dalam pewarnaan peta untuk menentukan kategori tinggi, sedang, dan rendah angka putus sekolah didasarkan pada 3 kategorisasi data menurut Saifuddin Azwar (2012: 149) yang dihitung dari mean dan standar deviasi angka anak putus sekolah. Adapun data kualitatif dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019: 321) yakni meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Keabsahan Data**

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji kredibilitas

dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data angka anak putus sekolah dan analisis yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga dapat dihasilkan peta persebaran anak putus sekolah Kabupaten Bangka Tengah yang menunjukkan jumlah dan sebaran anak putus sekolah per kecamatan sebagai berikut.



Gambar 2. Peta Persebaran Anak Putus Sekolah Tahun 2018-2023 Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui persebaran anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah. Dari peta diatas juga ditunjukkan bahwa pada 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018-2023, terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SMA yang ketika dijumlahkan berjumlah 1.928 anak, dengan rincian Kecamatan Simpang Katis berjumlah 253 anak (14%),

Kecamatan Namang 162 anak (8%), Kecamatan Pangkalan Baru 245 anak (13%), Kecamatan Koba 396 anak (20%), Kecamatan Lubuk Besar 391 anak (20%), dan Kecamatan Sungai Selan sebanyak 481 anak (25%). Adapun rincian sebaran anak putus sekolah per tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 2. Persebaran Anak Putus Sekolah

Kecamatan	Persebaran Anak Putus Sekolah Kabupaten Bangka Tengah						
	Tahun & Jumlah Anak Putus Sekolah						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Simpangkatis	42	39	44	45	57	26	253
Namang	38	25	17	31	37	14	162
Koba	51	79	52	104	68	42	396
Pangkalanbaru	43	43	33	51	53	22	245
Sungai Selan	82	85	65	113	96	40	481
Lubuk Besar	36	31	82	103	63	76	391

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa sekolah di setiap kecamatan pada setiap tahunnya (2018-2023) terdapat anak yang mengalami putus sekolah. Rincian data tersebut juga memosisikan Kecamatan Sungai Selan sebagai Kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak di Kabupaten Bangka Tengah, yakni sebanyak 481 anak dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Selain itu, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasanya tahun 2021 merupakan tahun dengan angka putus sekolah tertinggi dengan jumlah 447 anak yang terbagi dari 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah dengan grafik sebagai berikut.



Gambar 3. Jumlah Anak Putus Sekolah Berdasarkan Tahun

Adapun rincian sebaran anak putus sekolah tahun 2018-2023 per jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3. Persebaran Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Kecamatan	Jenjang Pendidikan			Total
	SD/MI	SMP/MTS	SMA/Sederajat	
Simpangkatis	56	85	112	253
Namang	41	69	52	162
Koba	51	61	284	396
Pangkalanbaru	46	48	151	245
Sungai Selan	89	179	213	481
Lubuk Besar	42	150	199	391

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa dilihat dari jenjang pendidikan anak putus sekolah di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018-2023, jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) menempati posisi sebagai jenjang yang paling banyak mengalami anak putus sekolah, yakni 1.011 anak atau sebesar 52%, diikuti jenjang SMP sejumlah 592 anak atau sebesar 31%, dan jenjang SD sebanyak 325 anak atau sebesar 17%.

Kemudian, untuk melihat sebaran anak putus sekolah di setiap Kecamatan, khususnya pada tiap-tiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, maka dibuat peta persebaran per jenjang pendidikan yang akan menggambarkan daerah terbanyak yang mengalami anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan selanjutnya sebagai berikut.



Gambar 4. Peta Persebaran Anak Putus Sekolah Jenjang SD Tahun 2018-2023 Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui persebaran anak putus sekolah jenjang SD beserta jumlah anak putus sekolah yang terdapat pada kecamatan masing-masing. Adapun daerah dengan sebaran anak putus sekolah jenjang SD paling banyak ditempati Kecamatan Sungai Selan sebanyak 89 anak dari tahun 2018-2023. Selain itu, tahun tertinggi anak jenjang SD putus sekolah ialah pada tahun 2018 sebanyak 86 anak dan tahun 2023 menjadi tahun terendah kasus anak putus sekolah, yakni sejumlah 28 anak.



Selanjutnya peta persebaran jenjang SMP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Peta Persebaran Anak Putus Sekolah Jenjang SMP Tahun 2018-2023 Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui persebaran anak putus sekolah jenjang SMP di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018-2023 yang menggambarkan daerah beserta jumlah anak putus sekolah yang terdapat pada kecamatan masing-masing. Adapun daerah dengan sebaran anak putus sekolah jenjang SMP yang menempati kategori tinggi ialah Kecamatan Sungai Selan sebanyak 179 anak dan diikuti oleh Kecamatan Lubuk Besar sebanyak 150 anak. Sedangkan Kecamatan Pangkalan Baru menempati kategori rendah yakni sebanyak 48 anak. Selain itu, berikut ditampilkan grafik tahun terbanyak anak mengalami putus sekolah dengan keterangan tahun tertinggi anak jenjang SMP yang putus sekolah mencapai 132 anak pada tahun 2022 dan tahun 2018 menjadi tahun terendah kasus anak putus

sekolah, yakni sejumlah 56 anak di Kabupaten Bangka Tengah.

Kemudian, untuk jenjang SMA peta persebaran dapat dilihat berdasarkan gambar berikut.



Gambar 6. Peta Persebaran Anak Putus Sekolah Jenjang SMA Tahun 2018-2023 Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan peta diatas, dapat diketahui persebaran anak putus sekolah jenjang SMA di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2018-2023 yang menggambarkan daerah beserta jumlah anak putus sekolah yang terdapat pada kecamatan masing-masing. Adapun daerah dengan sebaran anak putus sekolah jenjang SMP yang menempati kategori tinggi ialah Kecamatan Koba dengan jumlah 284 anak. Sedangkan Kecamatan Namang menempati kategori rendah yakni sebanyak 52 anak. Selain itu, berikut ditampilkan grafik tahun terbanyak anak mengalami putus sekolah dengan keterangan tahun tertinggi anak jenjang SMA yang putus sekolah mencapai 257 anak pada tahun 2021 dan tahun 2023 menjadi tahun terendah kasus anak putus

sekolah, yakni 115 anak di Kabupaten Bangka Tengah.

### **Faktor penentu anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah**

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan, terdapat beberapa macam penentu anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah diantaranya tidak berminat lagi sekolah, faktor ekonomi, menikah, drop out (DO), permintaan orang tua, Broken Home, dan sakit. Berdasarkan data yang dihimpun, faktor dominan yang menjadi penentu anak putus sekolah ialah karena tidak berminat lagi sekolah dengan jumlah mencapai 1.085 anak dari total 1.334 anak yang mengalami putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah sebanyak 1.334 diatas terhitung dari data yang dihimpun Dinas Pendidikan selama tahun 2020 – 2023 yang berasal dari 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Adapun rincian faktor penentu anak putus sekolah sebagai berikut

Tabel 4. Faktor Penentu Anak Putus Sekolah

Faktor Penentu Anak Putus Sekolah		
1	Tidak Berminat Lagi Untuk Sekolah	1.085
2	Ekonomi	95
3	Hamil	4
4	Sakit-Sakitan	12
5	Menikah	66
6	DO	25
7	Permintaan Orang Tua	19
8	Brokenhome	13
9	Alasan Lainnya	14

Faktor “Tidak Berminat Lagi Untuk Sekolah” menjadi penentu terbanyak anak putus sekolah di Kabupaten Bangka

Tengah. Faktor ini ketika ditelusuri lebih lanjut, disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, yang kemudian diikuti oleh pola pikir atau mindset bahwa pada akhirnya anak-anak akan bekerja sehingga pendidikan, khususnya sekolah tidak terlalu diprioritaskan. Diantara sebab munculnya pola pikir ini ialah mengingat topografi atau bentang alam wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang selain sangat memadai untuk pertanian dan perikanan, juga sangat kaya akan sumber daya alam khususnya timah. Oleh sebab itu, anak-anak, terutama usia remaja seringkali lebih tertarik ikut bekerja dalam tambang timah inkonvensional (TI) yang menjanjikan pendapatan yang tidak sedikit. Kebiasaan bekerja sejak remaja inilah yang membuat anak-anak malas untuk melanjutkan pendidikan karena merasa sudah bisa bekerja dan mencari uang. Hal itu kemudian membentuk suatu pola pikir dan pengaruh tersendiri bagi lingkungan, yakni anak-anak yang lain sehingga juga ikut memilih tidak melanjutkan untuk bersekolah.

### **Upaya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap anak putus sekolah**

Terdapat tiga aksi utama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah dalam penanganan

permasalahan anak putus sekolah, antara lain:

1. GETAS ITULAH (Gerakan Penuntasan Identifikasi Putus Sekolah), yang dimulai tahun 2022 dengan fokus sasarannya adalah penjaga kantor, cleaning service OPD, petugas kebersihan lingkungan, upayagkat desa/kelurahan dan juru pungut agar menyelesaikan pendidikan yang belum tamat (belum ada ijazah SD, SMP, dan SMA) dan terjaring 406 orang. Output lainnya dari program ini ialah adanya Gedung SKB beserta siswanya dan PKBM.
2. Mengembangkan PKBM melalui kelompok belajar (Pokjar)
3. Desa Asuh dalam rangka peningkatan IPM, dicanangkan sebagai penguat program GETAS ITULAH untuk menjaring dan mengajak warga bergabung dengan PKBM.

Selain itu, pada tahun 2023 mulai dirumuskan dan dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah yang sebelumnya didasari oleh Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Anak dan Penduduk di Luar Usia Sekolah Yang Putus Sekolah. Disamping sosialisasi, beberapa kemajuan yang telah diupayakan oleh dinas pendidikan antara lain ialah menginisiasi SMP Terbuka, yakni layanan pendidikan bagi anak usia 13-18 tahun

secara khusus bagi anak yang tidak bisa mengakses pendidikan jenjang SMP secara reguler karena hambatan tertentu seperti waktu, geografis, dan kondisi sosial ekonomi. Kemudian, Dinas Pendidikan juga telah mengadakan bantuan seperti perlengkapan siswa untuk anak kurang mampu dan menambah ruang kelas baru (RKB) serta kemudian juga direncanakan untuk mengalokasikan dana desa dalam rangka pencegahan anak putus sekolah.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, telah dihasilkan informasi terkait jumlah, persentase, sebaran, daerah (kecamatan), fluktuasi setiap tahun yang berkaitan dengan anak putus sekolah, baik secara umum maupun tiap-tiap jenjang pendidikan. Informasi yang sudah tersajikan dalam pemetaan ini sebagaimana dikemukakan oleh Setiawan (Septianto, 2021: 20) menjadi tujuan dasar pemetaan dilakukan, yakni salah satunya ialah untuk menggambarkan objek atau kenampakan yang ada pada permukaan bumi dalam bentuk fisik maupun sosial, dalam hal ini ialah untuk menggambarkan sebaran anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah. Sebagai fungsi peta yakni menyajikan gambaran permukaan bumi yang bertindak sebagai komunikasi informasi geografis, dalam hal ini informasi geografis mengenai anak putus sekolah.

Pemetaan yang telah dilakukan menemukan bahwa selama tahun 2018-2023 terdapat sebanyak 1.928 anak yang mengalami putus sekolah tersebar dari jenjang SD – SMA dengan catatan jenjang SD sejumlah 325 anak,, SMP sebanyak 592 anak, dan SMA/SMK/MA sebanyak 1.011 anak. 1.928 anak tersebut juga tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, yakni Kecamatan Simpang Katis 253 anak (14%), Kecamatan Pangkalan Baru 245 anak (13%), Kecamatan Namang 162 anak (8%), Kecamatan Koba 396 anak (20%), Kecamatan Lubuk Besar 391 anak (20%), dan Kecamatan Sungai Selan 481 anak (25%). Tahun tertinggi anak mengalami putus sekolah ialah tahun 2021 dengan jumlah 447 anak dan tahun terendah ialah tahun 2023 dengan jumlah total 220 anak serta kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah paling banyak dari tahun 2018-2023 ialah kecamatan sungai selan yakni 481 anak dan kecamatan dengan anak putus sekolah terendah diantara kecamatan yang lain ialah kecamatan namang dengan jumlah total 162 anak.

Hasil pemetaan ini penting mendapat perhatian pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah mengenai jumlah, persentase, sebaran, daerah (kecamatan), fluktuasi setiap tahun terkait dengan anak putus sekolah, baik secara umum maupun tiap-tiap jenjang pendidikan. Hal ini menjadi

penting mengingat amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Komitmen ini kemudian juga termanifestasikan salah satunya dalam program wajib belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar pasal 1 ayat (1) “wajib belajar adalah program minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Dalam hal ini, Kabupaten Bangka Tengah bahkan belum mencapai target wajib belajar 9 tahun. Artinya, diperlukan intervensi dan treatment yang tepat bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan anak putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah sehingga di masa mendatang terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya bonus demografi di Indonesia secara keseluruhan.

Kemudian, faktor penentu anak putus sekolah sebagaimana digolongkan oleh Mc Millen Kaufman dan Whitener (Suyadi, dalam Lestari, dkk, 2020) yang menyatakan anak putus sekolah disebabkan dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari anak putus sekolah yang

bersangkutan sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Yaneri, dkk (2022) menjelaskan diantara faktor internal ialah 1) intelegensi, 2) motivasi, 3) tingkat kesadaran peserta didik, dan 4) tidak menyukai sekolah. Sedangkan faktor eksternal antara lain 1) faktor ekonomi, 2) faktor sekolah, dan 3) faktor sosial budaya. Pada setting Kabupaten Bangka Tengah, urutan faktor internal anak putus sekolah ialah 1) motivasi, 2) kesadaran peserta didik (termasuk orang tua) 3) intelegensi, dan 4) tidak menyukai sekolah. Adapun faktor eksternal antara lain 1) faktor sosial budaya, 2) faktor ekonomi, dan 3) faktor sekolah.

Faktor internal, seperti yang dinyatakan sebelumnya yakni anak tidak berminat lagi untuk sekolah utamanya disebabkan motivasi dan kesadaran anak maupun orang tua di Kabupaten Bangka Tengah sangat rendah. Hal ini menjadikan anak malas bersekolah sehingga kemampuan intelegensi nya pun menjadi rendah sampai kemudian tidak menyukai sekolah. Rendahnya motivasi dan kesadaran akan pendidikan ini tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya, melainkan juga faktor lingkungan, dalam hal ini faktor eksternal terutama faktor sosial budaya. Masyarakat Bangka Belitung, termasuk Bangka Tengah terkenal dengan istilah budaya “dek kawa

nyusah” yang berarti tidak mau susah atau lebih tepatnya keengganan untuk melakukan sesuatu musabab sikap malas.

Pandangan dan sikap “dek kawa nyusah” ini secara tidak disadari telah menjadi semacam pola pikir atau mindset dalam masyarakat sehingga cenderung selalu menginginkan sesuatu yang mudah dan instan. Dalam konteks putus sekolah, pola pikir yang terbentuk ialah ketika pada akhirnya bersekolah juga untuk bekerja mencari uang, maka lebih baik bekerja secepat mungkin daripada menunggu lama karena bersekolah. Menurut penulis, sikap ini juga tidak muncul secara tiba-tiba. Sikap ini secara bertahap muncul salah satunya mengingat topografi atau bentang alam wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang selain sangat memadai untuk pertanian dan perikanan, juga dianugerahi sumber daya alam timah yang sangat kaya sehingga masyarakat terbiasa dengan mudahnya mendapatkan uang melalui penambangan timah.

Herman Togatorop (2020: 4) mengungkapkan awal fenomena ini tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi nasional. Sebelum tahun 1999, usaha lada putih menjadi primadona ekspor bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan menurunnya pendapatan masyarakat dari lada putih, membuat masyarakat beralih ke usaha tambang timah yang mulai dipandang menarik dan

menjanjikan keuntungan yang hasilnya dapat diperoleh dengan cepat. Penerapan kebijakan otonomi daerah (otda) juga menjadi faktor mengingat pasca kebijakan otonomi daerah lahir berbagai perda yang demi kebijakan pembangunan daerah dengan orientasi pada peningkatan PAD, sehingga pengelolaan tambang menganut asas konservasi radikal, yakni “gali terus selagi harga tinggi” tanpa diikuti pengelolaan lingkungan yang memadai. Akibatnya, tambang inkonvensional (TI) tumbuh menjamur yang kemudian juga melakukan ekspor logam timah tanpa merk (unbranded). Dalam konteks anak putus sekolah dewasa ini, berikut disajikan grafik harga timah dan angka putus sekolah.



Gambar 7. Harga Timah dan Jumlah Anak Putus Sekolah

Grafik diatas mengindikasikan bahwa semakin tinggi harga timah, semakin tertarik anak-anak untuk tidak bersekolah atau putus sekolah. Padahal, sumber daya alam berupa timah sebagaimana diprediksi oleh perwakilan Bank Indonesia (BI) pada forum Babel Economic Forum (2022) disebutkan akan habis dalam kurun waktu

10 sampai 24 tahun mendatang. Artinya, ketika sumber daya timah telah habis, maka pekerjaan dalam pertambangan tersebut juga akan berhenti. Hilangnya pekerjaan ini akan berdampak buruk manakala pekerja-pekerja tersebut tidak berpendidikan atau memiliki keterampilan lain sehingga hanya akan menjadi pengangguran. Dengan kata lain, prospek untuk bekerja pada pertambangan timah tidak lagi relevan untuk anak-anak di masa sekarang. Oleh karena itulah, diperlukan pencegahan dan kesadaran sehingga anak-anak dan terutama orang tua ikut memahami dan menyadari pentingnya pendidikan, dalam hal ini sekolah.

Adapun tiga aksi yang dilakukan dinas pendidikan, yakni GETAS ITULAH, Pengembangan PKBM, dan Desa Asuh, menurut hemat penulis menghasilkan luaran yang sama, yakni terjaringnya masyarakat bukan usia sekolah ke dalam PKBM untuk menyelesaikan pendidikan atau mengambil pendidikan kesetaraan setara SD/SMP/SMA. Padahal, yang seharusnya menjadi fokus sasaran utama ialah anak-anak usia sekolah, baik rentan putus sekolah maupun yang telah putus sekolah. Termasuk identifikasi penentu putus sekolah yang sebenarnya serta bagaimana langkah konkrit yang dapat dilakukan setelah identifikasi masalah dilakukan.

Sedangkan upaya lain seperti pengadaan SMP Terbuka, penambahan ruang kelas baru, bantuan biaya sekolah sudah tepat sebagaimana dinyatakan Nurjamilah & Ukhrotunnasihah (2018) bahwa memang faktor ekonomi, geografis/aksesibilitas, dan sosial budaya perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, termasuk dalam pencegahan anak untuk putus sekolah. Kemudian, yang patut menjadi concern ialah mengenai satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan putus sekolah yang kendati sudah terbentuk tapi belum dilaksanakan sehingga diperlukan tinjauan lebih lanjut di masa mendatang,

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Dalam rentang waktu tahun 2018-2023 angka anak putus sekolah Kabupaten Bangka Tengah masih tinggi pada tiap jenjang pendidikan dengan catatan jenjang SMA sebagai jenjang pendidikan terbanyak anak mengalami putus sekolah. Anak yang mengalami putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersebar di 6 Kecamatan dengan catatan anak putus sekolah tertinggi ditempati oleh Kecamatan Sungai Selan dan tahun tertinggi kasus anak putus sekolah ialah tahun 2021.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu utama yang membuat anak memutuskan untuk putus sekolah di Kabupaten Bangka Tengah ialah karena anak tidak berminat lagi untuk sekolah musabab rendahnya kesadaran dan motivasi anak beserta orang tua terhadap pendidikan. Rendahnya kesadaran dan motivasi ini disebabkan oleh faktor sosial budaya berupa pandangan dan sikap “dek kawa nyusah” atau sikap malas yang secara tidak disadari dimiliki oleh masyarakat. Pandangan dan sikap ini juga muncul mengingat topografi atau bentang alam wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang selain sangat memadai untuk pertanian dan perikanan, juga sangat kaya akan sumber daya alam khususnya timah sehingga tidak memprioritaskan sekolah dibandingkan bekerja.

Upaya Dinas Pendidikan dalam penanganan permasalahan anak putus sekolah ialah melalui beberapa aksi antara lain GETAS ITULAH (Gerakan Penuntasan Identifikasi Putus Sekolah), Pengembangan PKBM melalui kelompok belajar, menginisiasi Desa Asuh, SMP Terbuka, memberikan bantuan biaya perlengkapan sekolah, serta membentuk Satgas pencegahan dan penanganan anak putus sekolah.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, penulis mempunyai saran yaitu:

1. Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai urgensi pendidikan serta anti putus sekolah harus dilaksanakan secara kreatif, massif dan partisipatif untuk mengubah pandangan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Dinas Pendidikan membangun kerja sama dengan lembaga dan institusi lain serta komunitas masyarakat dalam melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan di masyarakat.
3. Menyediakan pendanaan atau beasiswa bagi anak putus sekolah agar bisa bersekolah kembali.
4. Melakukan pemetaan lebih lanjut mengenai kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2*. Pustaka Pelajar.
- Bidari, D.R., & Budiantara, I.N. (2020). *Pemodelan Faktor Yang Mempengaruhi Persentase Anak Putus Sekolah di Jawa Timur Menggunakan Regresi*

*Nonparametrik Spline Truncated*. *Jurnal Sains & Seni ITS*, 9 (2), 115-122.  
<http://doi.org/10.12962/j23373520.v9i2.52589>

- Dueramae, B. (2017). *Dampak Kemiskinan Terhadap Tingkat Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. [Skripsi, tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. (2013). *Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota*.
- Lestari, A.A.B., Kurniawan, F., & Ardi, R.B. (2020). *Penentu Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD)*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4 (2), 299-308.  
<http://doi.org/10.23887/jisd.v4i224470>.
- Mbae, A.T., Ogotan.m., & Palar.N.R.A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso*. *Jurnal Administrasi Publik*, e-journal.unsrat.ac.id  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/22040/21741>.
- Nurjamilah, L., & Ukhrotunnasihah. (2018). *Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan Di Desa Tegallega*. *THORIQOTUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2), 101-109.  
<https://doi.org/10.47971/tjpi.v1i2.111>
- Nursita, L., & Edy, B.S. (2022). *Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan*. Jambura



- Economic Education Journal, 4 (1), 1-15.
- Nurwati. (2022, Februari 3). Putus Sekolah Gara-Gara Harga Timah. Republika. <https://republika.co.id/berita/r6q56e483/putus-sekolah-gara-gara-harga-timah>.
- Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. (2017). Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pratama, R. (2022, Juli 28). Prediksi BI: Cadangan Timah di Babel Bakal Habis 10-24 Tahun Lagi, Hilirisasi Timah Tak Terwujud. Bangka Pos. [https://bangka.tribunnews.com/2022/07/28/prediksi-bi-cadangan-timah-di-babel-bakal-habis-10-24-tahun-lagi-hilirisasi-timah-tak-terwujud#google\\_vignette](https://bangka.tribunnews.com/2022/07/28/prediksi-bi-cadangan-timah-di-babel-bakal-habis-10-24-tahun-lagi-hilirisasi-timah-tak-terwujud#google_vignette).
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesi Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
- Septianto, H. (2021). Pemetaan Anak Putus Sekolah Di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016-2020. [Skripsi, tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2016). Kebijakan Pendidikan. Alfabeta.
- Togatorop, H. (2020). Kupas Kejahatan Tambang Timah Bangka Belitung. Pustakapedia.